

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu profesi yang menjadi penentu keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Menjadi ASN merupakan profesi yang menjadi dambaan setiap orang, namun menjadi ASN bukanlah hal yang mudah, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dan implementasikan di instansi tempat kita bekerja. Berdasarkan ‘Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014’, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keseluruhan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan kompetensi yang mumpuni agar setiap tugas pokok dan fungsi setiap profesi dapat dipenuhi dengan baik.

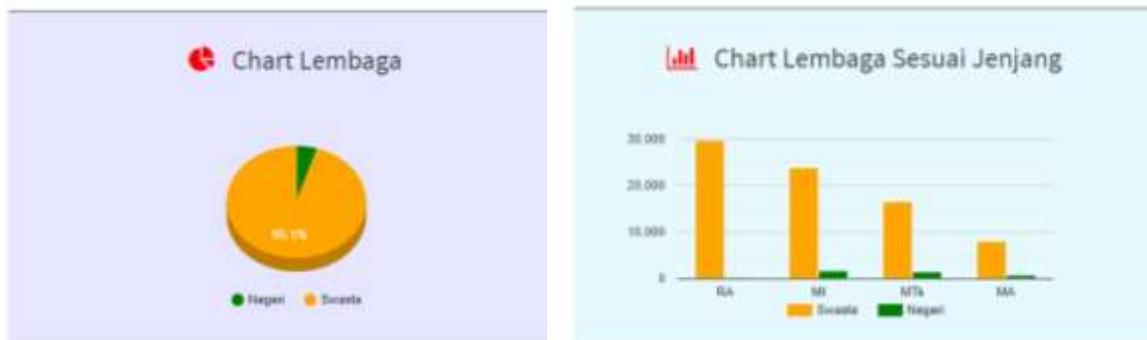
Salah satu ASN yang memiliki peranan yang cukup central dalam dunia pendidikan adalah guru. Guru merupakan jabatan fungsional yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan garda terdepan keberhasilan pendidikan suatu bangsa. Kualitas pendidikan anak bangsa ditentukan oleh profesionalisme guru dalam memberikan pengajaran. Oleh karena itu setiap guru dituntut untuk dapat menjalankan profesinya secara professional.

Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Menurut *Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 tahun 2005 2010)*, seorang guru professional diharuskan memiliki empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kepribadian,

professional, dan sosial. Selain itu, guru profesional juga dituntut untuk menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Dengan adanya guru yang professional diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengalami peningkatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi guru. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu pembinaan yang bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan guru. Selain itu, melalui diklat diharapkan guru dapat selalu mengupdate pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Berdasarkan data statistik pendidikan di Kementerian Agama pada tahun 2020 (Kemenag, 2020), total guru se-Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Agama adalah sebanyak 82.418, dengan klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 1 (Sumber: <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik>). Namun, dari keseluruhan guru yang terdaftar, masih banyak guru-guru yang belum pernah mengikuti pelatihan. Hal ini berdasarkan wawancara singkat yang telah dilakukan oleh salah seorang guru Madrasah Aliyah, menurut Y (Inisial Guru yang diwawancarai), ia belum pernah mengikuti diklat sejak terangkat menjadi guru pada tahun 2018. Padahal, aturan menjelaskan bahwa minimal seorang guru wajib mengikuti diklat sekali dalam setahun.



Gambar 1.1 Statistik Guru Kementerian Agama

Adapun data yang diperoleh dari Balai Diklat Keagamaan (BDK) Ambon, yakni tercatat 3292 jumlah guru untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara yang merupakan

Zainal Bakri, 2023

DESAIN KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF UNTUK PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) GURU DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN AMBON

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

wilayah kerja BDK Ambon. Dari keseluruhan jumlah tersebut tercatat 1610 Guru yang telah mengikuti diklat pada tahun 2020, dengan total 54 diklat. Namun dari daftar nama diklat yang dapat dilihat pada bagian lampiran 1, tidak ada diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan guru untuk komponen publikasi ilmiah yang dilaksanakan. Padahal diklat ini sangat penting dalam menunjang profesionalisme dan karir seorang guru. Jika dilihat dari hasil uji kompetensi guru (Kemendikbud, 2020) pada <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>, nilai rata-rata UKG untuk provinsi maluku dan maluku utara masih cukup rendah yakni 45.50, untuk detail nilainya dapat dilihat pada lampiran 2. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru memerlukan perhatian khusus terutama dari penyelenggara pelatihan.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PMA, 2018), komponen PKB guru terdiri atas pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh guru, forum kerja guru, atau asosiasi/organisasi profesi guru. Adapun karya inovatif yang dimaksud meliputi penyusunan pedoman pembelajaran dan instrument penilaian, pembuatan media dan sumber belajar, serta pengembangan atau penemuan teknologi pembelajaran. Sementara publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah kegiatan menghasilkan karya tulis/tulisan yang nantinya akan dipresentasikan dan dipublikasikan dalam forum ilmiah atau jurnal bereputasi, baik skala nasional maupun skala internasional.

Hasil wawancara dengan salah seorang widyaiswara di BDK Ambon, pada tahun 2020 dan tahun 2021, tidak ada diklat karya tulis ilmiah yang dilaksanakan, padahal

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wesnawa, 2019) dan (Wesnawa, Indra and Christiawan, 2020) tentang hasil survey profil guru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa aspek pengembangan profesi, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan aspek karya inovatif guru masih terkategori rendah. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Wesnawa, I. G. A., Christiawan, 2021) bahwa guru belum banyak melakukan kajian pada aspek publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah. Masih banyak guru yang belum mengetahui bagaimana menyusun karya tulis ilmiah sebagai salah satu bentuk pengembangan karir mereka. Akibatnya kenaikan pangkat/jabatan guru akan tertunda karena belum terpenuhinya persyaratan publikasi sesuai dengan Permen PAN-RB.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan widyaiswara di BDK Ambon juga diperoleh informasi bahwa dalam rapat koordinator BDK Ambon tahun 2021, ada keperluan bagi guru dalam hal pengembangan keprofesian dalam hal ini menulis karya tulis ilmiah. Sementara pada tahun 2021 pelatihan KTI tidak dilaksanakan. Mengacu pada rencana pelatihan tahun 2022 yang diperoleh dari Sub Koordinator Teknis BDK Ambon, tidak ada diklat karya tulis ilmiah bagi guru yang dilaksanakan dalam daftar pelatihan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam daftar diklat tahun 2022 yang disajikan pada Lampiran 3.

Salah satu alasan tidak dilaksanakannya pelatihan KTI adalah karena kurikulum KTI yang ada belum terupdate dan masih menggunakan kurikulum lama. Sementara saat ini, hampir seluruh kurikulum dan silabus pelatihan sudah menggunakan kurikulum *blended learning*. Hal ini jelas menjadi hal yang krusial bagi suatu lembaga penyelenggara diklat karena diklat tidak akan mungkin berjalan jika tidak didukung dengan kurikulum yang baik. Kurikulum yang dilaksanakan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini agar diklat tersebut mampu memenuhi kebutuhan pesertanya. Tabel 1 menunjukkan Kurikulum diklat karya tulis ilmiah yang masih belum terupdate.

Tabel 1.1 Kurikulum Pelatihan Karya tulis ilmiah

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELATIHAN
A	KELOMPOK DASAR	
1	Pembangunan Bidang Agama	3
2	Nilai-Nilai Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama	3
3	Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama	3
	Jumlah	9
B	KELOMPOK INTI	
1	Karya tulis ilmiah sebagai Pengembangan Profesi	6
2	Sistematika Karya tulis ilmiah	8
3	Teknik Analisis Data	8
4	Penyusunan Karya tulis ilmiah	18
5	Media Publikasi	4
	Jumlah	44
C	KELOMPOK PENUNJANG	
1	<i>Overview</i>	1
2	<i>Building Learning Commitment</i>	3
3	Rencana Tindak Lanjut	1
4	Evaluasi Program	1
5	Ujian	1
	Jumlah	7
TOTAL		60

(Sumber: Dokumen Kurikulum Pelatihan Balai Diklat Keagamaan Ambon)

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa kurikulum yang digunakan masih belum berbasis teknologi dan informasi komunikasi sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0 saat ini. Kurikulum yang digunakan masih didesain untuk pembelajaran klasikal yang *full* tatap muka. Padahal, salah satu upaya pemenuhan kompetensi ASN adalah harus mempertimbangkan perkembangan teknologi, misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memadukan *e-learning* dan tatap muka yang disebut *blended learning*. *Blended Learning* (BL) merupakan perpaduan

antara pembelajaran tradisional *face-to-face* dengan pembelajaran yang berbasis teknologi *online (e-learning)*, guna meningkatkan mutu pendidikan (Ross and Gage, 2006).

Para ahli bahkan berpendapat bahwa *blended learning* akan menjadi model pembelajaran yang nantinya akan mendominasi dalam sistem pembelajaran dunia (Norberg, Dziuban and Moskal, 2011). Hal ini sejalan dengan beragam hasil penelitian yang telah menunjukkan bahwa *blended learning* sangat efektif dalam meningkatkan pembelajaran di kelas (Halverson *et al.*, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Fadillah, 2019) juga menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi berbasis *e-learning* berjalan dengan sangat baik dan menghasilkan *output* peserta diklat yang secara kualitatif meningkat dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, hasil penelitian (Rahman, Amarullah and Hidayah, 2020) juga menunjukkan bahwa penggunaan *blended learning* merupakan solusi efektif dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS) karena dapat meningkatkan pemahaman peserta diklat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya pelatihan yang dilakukan berbasis *blended learning* karena cukup efektif dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan.

Disamping itu, jika dilihat wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Ambon (BDK Ambon) yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Luas wilayah sekitar 712.279,69 Km dengan 54.185 km daratan, 658.294 km lautan terdiri dari 1.390 pulau atau sekitar 7,6% luas daratan dan 92,4% luas lautan (Bps, 2022). Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh Balai Diklat Keagamaan Ambon yang harus diberikan kepada peserta diklat. Konsekuensinya akan berdampak pada terbatasnya volume kediklatan. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam pelaksanaan diklat yaitu dengan model pembelajaran *blended learning* diharapkan akan membantu terlaksananya pendidikan dan pelatihan dengan maksimal di Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, jika dilihat dari hasil analisis kebutuhan diklat yang dilakukan oleh BDK Ambon pada tahun 2021, diperoleh hasil bahwa salah satu diklat yang dibutuhkan

guru adalah diklat publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil Analisis kebutuhan diklat yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1.2. Hasil Analisis Kebutuhan Diklat

NO	Nama Jabatan yang Membutuhkan Diklat	Jenis Diklat	Jumlah Usulan	Sumber Data	Alasan Keurgenan
1.	Guru	Media Pembelajaran Model Pembelajaran Instrumen Penilaian Publikasi Ilmiah	15	Kanwil, Pendis, Kankemenag Kasi Pendis	Peningkatan Kompetensi dalam rangka sertifikasi dan kenaikan pangkat
2.	Pengawas	Calon Pengawas	15	Kanwil, Pendis	Kebutuhan pengangkatan calon pengawas.
3	Penyuluh Agama	KTI bagi Penyuluh Agama	15	Urais	Peningkatan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat
4	Penghulu	Penghulu Pertama	15	Urais	Persyaratan kenaikan pangkat
5	Pegawai Administrasi	Keuangan Tata Persuratan Revolusi Mental	15	Kasubag TU dan Kepala Kemenag	Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan dan pelaporan

(Sumber: Data Penjaminan Mutu BDK Ambon)

Dari berbagai sumber data dan hasil analisis jurnal tentang analisis kebutuhan diklat menunjukkan bahwa diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru dalam aspek karya tulis ilmiah sangat urgent dan sangat dibutuhkan bagi guru sebagai bentuk peningkatan kompetensi. Hal ini bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penyelenggara diklat dalam mengatasi gap kompetensi yang terjadi pada profesi guru.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas terkait kesenjangan kompetensi guru khususnya dalam aspek karya tulis ilmiah dan wilayah lautan yang begitu luas, penulis tertarik untuk merancang desain kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon. Dalam penelitian ini akan didesain kurikulum pelatihan Karya tulis ilmiah sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme guru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Desain Kurikulum Pelatihan Teknis Substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon?”. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti merumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis kebutuhan kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon
2. Bagaimanakah desain kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon
3. Bagaimanakah evaluasi kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon.
2. Membuat desain kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon.

3. Mendeskripsikan hasil evaluasi kurikulum pelatihan teknis substantif untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru di Balai Diklat Keagamaan Ambon.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan referensi secara teori terkait bagaimana mendesain kurikulum pelatihan yang relevan dengan era revolusi industri saat ini yang juga disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder* yang bersangkutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsi pada pengembangan disiplin ilmu kurikulum terutama dalam desain kurikulum pelatihan.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan secara spesifik sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mendesain kurikulum pelatihan khususnya terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif pada kurikulum pelatihan lainnya.
2. Bagi BDK Ambon dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu program pelatihan untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru, dalam hal ini pelatihan karya tulis ilmiah.
3. Bagi pengelola pelatihan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemenuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik dari segi tujuan pelatihan, materi yang digunakan dalam pelatihan, strategi dan penilaian dalam kurikulum pelatihan.
4. Bagi guru, materi yang didesain dalam kurikulum ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hal ini dapat mendukung peningkatan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.5. Struktur Organisasi Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor UPI Nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019. Tesis ini terdiri atas empat bab utama, yaitu Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Deskripsi sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

- BAB I : Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis
- BAB II : Bab II berisi Kajian Pustaka, menguraikan teori, konsep, dan uraian penjelasan yang terkait dengan topik tesis dan bersumber dari literature yang relevan
- BAB III : Bab III berisi Metode Penelitian, menguraikan mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.
- BAB IV : Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan mengenai hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian serta pembahasan temuan penelitian.
- BAB V : Bab V berisi Simpulan terhadap pembahasan temuan penelitian yang telah dilakukan, Implikasi yang mungkin ditimbulkan, dan Rekomendasi yang relevan sesuai dengan tujuan penulisan tesis.